

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia menurut Suharto (2009: 131) merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat. Menurut chambers (dalam Chriswardani; 2005:122) dapat dibedakan menjadi empat pengertian yaitu, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kemiskinan relatif disini adalah miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ke timpangan distribusi pendapatan. Standart minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah di urutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Miskin kultural berkaitan dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha sama sekali memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari orang lain yang membantunya. Kemiskinan struktural adalah rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial, budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, akan tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia , bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia. kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan orang lain yang

tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi . hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin karena mereka tidak sadar akan kemiskinannya sendiri. Selain itu kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidemensi Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain. Inilah kondisi yang dirasakan oleh Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kehidupan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus di penuhi setiap orang .

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan tepenuhnya kebutuhan akan sandang dan pangan meskipun kenyataanya terdapat peringkat akan pemenuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas. Teori maslow menyebut bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, pangan dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya.

Perumahan merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian Rumah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi jadi jika ditinjau dari proses bermukim rumah merupakan sarana untuk berlindung dari alam memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Dirumah dan lingkunganlah di bentuk kepribadian manusia, maka dari itu dibutuhkan perumahan yang aman, nyaman, dan tentram.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus di penuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media sebagai pelaksana bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhi salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, di harapkan ketahanan keluarga.

Pada hakikatnya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya di lihat dari sisi fisik mental dan sosial ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami permasalahan rumah tidak layak huni yang di huni atau di miliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh karena itu kepedulian menangani masalah tersebut di harapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta elemen lainnya. Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 H amandemen ke 4, dijelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat indonesia, maka setiap warganya

berhak bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat” . Bantuan program rehabilitasi rumah tidak huni yang di perunttukan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di daerah, penyalurannya dilakukan oleh direktorat penanggulangan kemiskinan perkotaan. Sedangkan di perdesaan, penyaluran dilakukan oleh Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan. Dalam pelaksanaannya program rehabilitasi rumah tidak layak huni hanya melakukan pemugaran atau merehap rumah. Karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki, bukan untuk merombak total bangunan rumah. Rumah yang di rehabilitasi tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan. Agar pelaksanaannya sesuai dengan penerima, maka para penerima diharuskan memiliki skala prioritas dalam menentukan apa saja yang harus di rehab. Hal ini perlu di lakukan agar dana yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi penerima bantuan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan yaitu:

Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan judul yang telah tertera di atas yakni “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Glagahweru Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap implementasi kebijakan program khususnya di tingkat kecamatan.
- b. Memberikan pemahaman secara teori dalam melihat faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan suatu program kebijakan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi temuan baru dalam melihat implementasi suatu program khususnya dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

2. Manfaat praktis

- a. Hasil implementasi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang telah dilakukan di Desa Glagahwero
- b. Saran bagi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Glagahwero

3. Manfaat bagi peneliti

- a. Dapat memperkaya pehaman, kemampuam analisis dan akademik mahasiswa dalam hal pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kondisi nyata mengenai implementasi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Mendapat pengalaman dalam pendampingan khusus untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni .
- c. Mendapatkan data valid sebagai bahan penulisan karya ilmiah (skripsi).